

# ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-000410.99/2024/PP/M.XVIB TAHUN 2024: STUDI KASUS SENGKETA PAJAK PT. SINAR PELITA ABADI

Immanuel Maruli Tua Malau<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup> Immanuel Maruli Tua Malau; Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Medan, Indonesia, email: [immanuel2588@gmail.com](mailto:immanuel2588@gmail.com)

\* Immanuel Maruli Tua Malau email: [immanuel2588@gmail.com](mailto:immanuel2588@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel  
Diterima: 1 Desember 2024  
Direvisi: 5 Januari 2025  
Diterima: 3 Februari 2025  
Diterbitkan: Maret 2025

### Keywords:

Tax Dispute; Tax Court; Income Tax (PPh); Judgment.

### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1>

## Abstract

Tax disputes are often a complex issue in the Indonesian tax system, especially when it comes to the issuance of Tax Bills (STP). This research analyzes a tax dispute case between PT Sinar Pelita Abadi as the Plaintiff and the Directorate General of Taxes as the Defendant, related to STP on Income Tax (PPh) for the May 2022 tax period. This research uses a normative juridical method with a descriptive approach, data collection techniques through document studies, and qualitative data analysis. The results of the analysis show that the issuance of STP by the Directorate General of Taxes does not meet the formal and material requirements as stipulated in the applicable tax regulations. The Tax Court decided to grant PT SPA's lawsuit and cancel the STP. This finding emphasizes the importance of compliance with administrative and substantial procedures in the issuance of STP, as well as the role of the tax court in ensuring justice for taxpayers. In addition, this study also identifies the need for reforms in the tax system to improve transparency, accuracy, and accountability of tax authorities. By providing a comprehensive analysis of this case, this research contributes to the development of a fairer and more effective tax dispute resolution system in Indonesia.

Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## LATAR BELAKANG

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam sistem keuangan negara, karena merupakan sumber utama pendapatan bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Tanpa pajak, negara akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan lainnya. Oleh karena itu, penerapan sistem perpajakan yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan negara. Salah satu faktor kunci dalam mencapainya adalah penerapan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip keadilan dalam perpajakan, baik bagi wajib pajak maupun bagi negara, menjadi hal yang mutlak untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang ada. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering kali menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan hukum yang hati-hati dan tepat. Salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan adalah sengketa yang sering terjadi antara wajib pajak dan otoritas pajak, khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.<sup>1</sup>

Salah satu contoh sengketa yang sering terjadi adalah yang berkaitan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). STP ini merupakan instrumen yang digunakan oleh otoritas pajak untuk menagih pajak yang belum dibayar atau dilaporkan oleh wajib pajak. Namun, dalam banyak kasus, wajib pajak merasa bahwa STP yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi jumlah pajak yang dihitung, prosedur administrasi yang diterapkan, maupun substansi dari kewajiban pajak itu sendiri. Sengketa semacam ini dapat memicu ketegangan antara wajib pajak dan otoritas pajak, dan jika tidak diselesaikan dengan tepat, dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak serta merusak hubungan antara kedua pihak.

Penyelesaian sengketa pajak ini menjadi semakin penting, karena tidak hanya berdampak pada hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak, tetapi juga pada pengelolaan keuangan negara. Proses penyelesaian sengketa ini memerlukan jalur hukum yang jelas, agar setiap pihak merasa diperlakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengadilan pajak berperan penting dalam memberikan keputusan atas sengketa

---

<sup>1</sup> Sa'adah, N. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 19–33. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.19-33>

tersebut, dengan menilai apakah tindakan yang diambil oleh otoritas pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah kewajiban pajak ditagihkan sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini keberadaan lembaga pengadilan pajak menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan negara. Proses peradilan pajak yang transparan dan objektif tidak hanya akan menyelesaikan sengketa dengan adil, tetapi juga berpotensi memperbaiki sistem perpajakan itu sendiri, mengurangi praktik ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa pajak sebagai instrumen keuangan negara dapat berfungsi dengan baik.<sup>2</sup>

Sengketa pajak dapat menimbulkan dampak yang signifikan baik bagi wajib pajak maupun bagi penerimaan negara. Bagi wajib pajak, ketidakpastian yang dihasilkan dari sengketa pajak dapat mempengaruhi keputusan bisnis dan mengganggu kestabilan finansial mereka. Selain itu, ketidaksepakatan mengenai kewajiban perpajakan sering kali disertai dengan perasaan ketidakadilan, terutama jika ada pandangan bahwa otoritas pajak tidak bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, bagi negara, sengketa pajak yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menghambat aliran pendapatan yang sangat diperlukan untuk membiayai berbagai program publik, yang pada akhirnya mempengaruhi pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa pajak dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>3</sup>

Peradilan pajak berperan sangat vital dalam menyelesaikan sengketa ini. Sebagai lembaga yang independen, pengadilan pajak harus mampu memberikan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak—baik wajib pajak maupun negara—berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan. Proses peradilan pajak di Indonesia bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi wajib pajak yang merasa dirugikan akibat tindakan administratif yang dilakukan oleh otoritas pajak. Pengadilan pajak, dengan kekuatannya, diharapkan dapat memberikan putusan yang bukan hanya sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi juga dapat menciptakan rasa keadilan di mata publik. Dengan cara ini, penyelesaian sengketa pajak

---

<sup>2</sup> Hadi, H. R., Winarno, B., & Budiono, A. R. (2017). *Reformulation of Tax Dispute Resolution in Indonesia*.

<sup>3</sup> Ribbon, R. H., Romainur (2022). Tax Dispute PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. in the Tax Court Analysis of Decision Number: PUT-117384.15/2014/PP/M.XVI.A Year 2020. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5 (3). <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6736>

melalui jalur peradilan tidak hanya penting untuk memberikan hak bagi wajib pajak, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan negara.

Sengketa pajak antara PT. Sinar Pelita Abadi dan Direktur Jenderal Pajak, yang tercermin dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000410.99/2024/PP/M.XVIB Tahun 2024, menggarisbawahi perbedaan persepsi yang sering terjadi antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai kewajiban perpajakan. PT. Sinar Pelita Abadi mengajukan keberatan terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan atas Pajak Penghasilan (PPh) untuk masa pajak Mei 2022, dengan alasan bahwa jumlah pajak yang terutang yang tercantum dalam STP tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kasus ini menunjukkan bagaimana ketidakselarasan dalam interpretasi peraturan pajak, baik oleh wajib pajak maupun pihak otoritas pajak, dapat menimbulkan ketegangan dan berakhir di pengadilan pajak. Dalam hal ini, sengketa ini bukan hanya mencerminkan perbedaan angka yang dibebankan, tetapi juga bagaimana aturan pajak diinterpretasikan oleh pihak yang berbeda, yang pada akhirnya menuntut penyelesaian melalui proses litigasi di pengadilan pajak.

Proses litigasi yang terjadi di pengadilan pajak menjadi penting karena memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mengajukan bukti dan argumen terkait kewajiban pajak yang disengketakan. Dalam hal ini, PT. Sinar Pelita Abadi berpendapat bahwa STP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak mencerminkan perhitungan yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mereka mengajukan gugatan untuk membatalkan STP tersebut. Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam berhadapan dengan kebijakan pajak yang terkadang tidak jelas atau dianggap merugikan oleh mereka. Oleh karena itu, peran pengadilan pajak sebagai lembaga yang independen sangat krusial dalam memberikan keputusan yang dapat memastikan bahwa keputusan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan memberikan keadilan bagi wajib pajak

Urgensi penelitian mengenai sengketa pajak di Indonesia sangat penting, mengingat fenomena ini sering terjadi di kalangan wajib pajak, baik individu maupun perusahaan. Sengketa pajak, terutama yang melibatkan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), bisa menimbulkan ketidakpastian yang berdampak negatif bagi kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan negara. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan pajak memiliki peran yang sangat krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Proses ini memungkinkan adanya evaluasi terhadap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh

otoritas pajak, sekaligus memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan keberatannya dalam kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Melalui proses peradilan pajak, kedua belah pihak dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai alasan dan dasar hukum dari keputusan pajak yang diterbitkan.<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan proses hukum dalam sengketa pajak yang melibatkan PT. Sinar Pelita Abadi dengan Direktur Jenderal Pajak, yang mencakup kajian terhadap aspek prosedural dan substansial dari penerbitan STP yang dipermasalahkan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pengadilan pajak menilai dan memutuskan suatu sengketa pajak, serta apakah keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pajak. Hal ini sangat penting karena memberikan gambaran tentang bagaimana pengadilan pajak dapat berperan dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh otoritas pajak tidak melanggar hak-hak wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan di Indonesia.<sup>5</sup>

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi perbaikan dalam sistem penyelesaian sengketa pajak, terutama dalam hal penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), yang merupakan salah satu sumber utama perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam hal ini, prosedur administrasi perpajakan perlu dievaluasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Sistem yang jelas dan transparan akan membantu mencegah timbulnya sengketa, mengingat bahwa banyak sengketa pajak timbul akibat ketidakjelasan dalam peraturan atau prosedur yang diterapkan oleh otoritas pajak.<sup>6</sup> Dengan memperbaiki proses penerbitan STP, diharapkan dapat mengurangi kesalahan administratif yang dapat merugikan wajib pajak maupun negara. Selain itu, peningkatan kualitas pengambilan keputusan di pihak otoritas pajak dan pengadilan pajak juga akan sangat berpengaruh terhadap keadilan dan kepastian hukum yang diterima oleh wajib pajak. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang terjadi, serta memberikan referensi yang berguna bagi wajib pajak, praktisi hukum, dan akademisi. Dengan memahami dengan lebih

---

<sup>4</sup> DDTC Academy. (2023). *Sengketa Pajak Di Inidonesia: Risiko, Realitas, dan Pencegahan*.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Mekari klikpajak. (2024). *Mengenal Pengadilan Pajak serta Tugas dan Wewenangnya*.

baik tentang bagaimana sengketa pajak diselesaikan melalui pengadilan pajak, diharapkan pihak-pihak terkait dapat mencegah potensi sengketa serupa di masa depan. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan sistem perpajakan Indonesia agar lebih efektif dan efisien. Dari perspektif akademis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai hukum perpajakan di Indonesia dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa depan.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini akan menganalisis putusan Pengadilan Pajak dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan mekanisme penyelesaiannya. Melalui teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, penelitian ini akan menggali substansi hukum yang mendasari keputusan pengadilan terkait sengketa pajak antara PT. Sinar Pelita Abadi dan Direktur Jenderal Pajak. Dengan menganalisis putusan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengadilan pajak menilai kewajiban pajak yang disengketakan, serta menilai apakah keputusan yang diambil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap prosedur administratif dan penerbitan STP sesuai ketentuan yang ada. Pendekatan ini akan mengungkapkan relevansi antara aturan yang ada dengan praktik yang diterapkan dalam sistem peradilan pajak.<sup>7</sup>

Selain itu, penelitian ini juga akan menilai berbagai faktor yang memengaruhi keputusan yang diambil oleh pengadilan pajak, seperti apakah prosedur administratif dalam penerbitan STP telah dipatuhi dengan benar, serta apakah kebijakan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dampak dari keputusan tersebut juga akan dianalisis, khususnya terhadap hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak, baik dari segi kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan maupun terhadap dampak jangka panjang pada kepatuhan pajak. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem peradilan pajak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Hal ini akan memperkuat hubungan yang lebih adil dan saling menguntungkan

---

<sup>7</sup> OnlinePajak. (2023). *Sengketa Pajak dan Cara Penyelesaiannya di Indonesia*.

antara wajib pajak dan otoritas pajak, serta mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan praktik hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Pendekatan ini sangat penting dalam memahami bagaimana aturan-aturan perpajakan diterapkan dalam konteks sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak, khususnya mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang berfokus pada penggambaran secara rinci mengenai proses hukum yang terjadi dalam kasus yang sedang dianalisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, merupakan metode utama dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan sengketa pajak. Dalam konteks ini, studi dokumen akan mencakup analisis terhadap putusan Pengadilan Pajak yang relevan, Undang-Undang Perpajakan, serta peraturan-peraturan yang mengatur penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

Analisis data dilakukan secara kualitatif, menggali lebih dalam mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengadilan. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti interpretasi hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian pengadilan, dan dampak keputusan terhadap hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia sering kali melibatkan interpretasi hukum yang kompleks dan beragam, terutama ketika peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh otoritas pajak bertentangan dengan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Dalam hal ini, pengadilan pajak memegang peran penting sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai kesesuaian penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada analisis dokumen yang terkait dengan sengketa pajak, seperti putusan Pengadilan Pajak dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur administrasi perpajakan, untuk menilai apakah prosedur yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada,

dan apakah keputusan yang diambil oleh pengadilan pajak mencerminkan keadilan bagi wajib pajak. Dengan studi dokumen yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan bagaimana praktik hukum berjalan dalam konteks sengketa pajak, serta sejauh mana hukum diterapkan secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>8</sup>

Analisis ini juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi keputusan pengadilan pajak, seperti kepatuhan terhadap prosedur administratif yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Sebagai contoh, dalam penelitian mengenai sengketa pajak, penting untuk memperhatikan bagaimana pengadilan pajak menilai apakah prosedur administratif yang diterapkan sudah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam hal ini, keputusan pengadilan sering kali dipengaruhi oleh adanya interpretasi yang berbeda antara otoritas pajak dan wajib pajak mengenai aturan yang ada. Sehingga, melalui penelitian dokumen, bisa dianalisis apakah terdapat kekeliruan dalam penerapan ketentuan pajak atau apakah peraturan yang ada sudah memadai dalam menyelesaikan sengketa dengan adil. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem peradilan pajak di Indonesia, dengan menawarkan wawasan mengenai potensi kelemahan yang ada dalam prosedur dan penerapan hukum pajak yang bisa menyebabkan ketidakadilan atau ketidakpastian hukum bagi wajib pajak, seperti yang ditemukan dalam sejumlah sengketa yang pernah diajukan ke Pengadilan Pajak.

Dalam konteks sengketa pajak yang melibatkan PT. Sinar Pelita Abadi (PT SPA) dan Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak yang berfokus pada penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan (PPh) untuk masa pajak Mei 2022.

PT SPA mengajukan keberatan terhadap STP yang diterbitkan oleh otoritas pajak, dengan alasan bahwa jumlah pajak yang terutang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sengketa ini menyoroti pentingnya penerapan prosedur administratif yang tepat dalam penerbitan STP serta apakah keputusan yang diambil oleh pengadilan pajak sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi hukum yang diharapkan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji apakah

---

<sup>8</sup> Fata, H. I., Murti, G. T., Raharja, M. D., Al-Hakim, F. R., & Qatrunada, M. N. (t.t.). *Submission and Settlement of Tax Disputes Through Objection, Appeal, and Judicial Review*.

pengadilan pajak sudah mempertimbangkan dengan cermat semua aspek hukum, termasuk prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan, dalam memutuskan sengketa ini.<sup>9</sup>

Dokumen terkait yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa pajak, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, memberikan panduan jelas mengenai langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengajukan keberatan atau gugatan terhadap keputusan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal PT SPA, pengajuan keberatan yang dilakukan oleh wajib pajak menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara interpretasi otoritas pajak terhadap kewajiban perpajakan dan pemahaman wajib pajak itu sendiri mengenai jumlah yang harus dibayar. Oleh karena itu, melalui studi dokumen putusan pengadilan pajak, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah prosedur administrasi yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan apakah keputusan yang diambil oleh pengadilan mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya diterima oleh pihak wajib pajak, dalam hal ini PT SPA.

Tabel 1 Analisis Kasus Sengketa Pajak PT. Sinar Pelita Abadi

No	Elemen Putusan	Uraian	Keterangan
1	Pihak-Pihak	Sengketa ini melibatkan PT. Sinar Pelita Abadi (sebagai Penggugat) dan Direktorat Jenderal Pajak (sebagai Tergugat). PT SPA merupakan wajib pajak yang merasa dirugikan oleh penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan (PPh) masa pajak Mei 2022. Direktorat Jenderal Pajak adalah otoritas yang bertanggung jawab atas penerbitan STP tersebut.	Sengketa ini menggambarkan hubungan hukum antara wajib pajak sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak dan otoritas pajak sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penagihan. Adanya ketidakcocokan terkait jumlah pajak yang ditagihkan menjadi sumber utama konflik.
2	Posita/Dasar-Dasar Hukum Penggugat	Penggugat mendalilkan bahwa pelaporan pajak telah dilakukan sesuai ketentuan, sehingga STP yang diterbitkan tidak sah.  Penggugat menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian dalam perhitungan dan dasar hukum penerbitan STP oleh Tergugat.	Penggugat mengacu pada Undang-Undang Perpajakan dan menyoroti pelanggaran formal dan material dalam penerbitan STP.  Penggugat menggunakan argumen hukum untuk membatalkan STP, dengan

<sup>9</sup> Lenz, H. (2020). Aggressive Tax Avoidance by Managers of Multinational Companies as a Violation of Their Moral Duty to Obey the Law: A Kantian Rationale. *Journal of Business Ethics*, 165(4), 681–697. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4087-8>

		<p>Penggugat mendasarkan keberatannya pada ketidaksesuaian STP dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). PT SPA menilai bahwa penerbitan STP tidak memenuhi syarat formal maupun material, seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut.</p>	<p>fokus pada ketidakpatuhan otoritas pajak terhadap prosedur administratif yang berlaku.</p>
3	Pembelaan Tergugat	<p>Tergugat menyatakan bahwa STP diterbitkan berdasarkan data pelaporan dan pembayaran pajak yang dianggap kurang bayar. Tergugat berargumen bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.</p>	<p>Pembelaan ini bertumpu pada kewenangan otoritas pajak dalam mengevaluasi dan menagih kewajiban pajak.</p>
4	Pertimbangan Majelis Hakim	<p>Majelis Hakim menemukan bahwa STP yang diterbitkan Tergugat tidak memenuhi ketentuan formal dan material.</p> <p>Hakim menilai bahwa ada pelanggaran prosedural dalam penerbitan STP yang merugikan Penggugat.</p>	<p>Hakim menggunakan bukti-bukti dokumen dan peraturan perpajakan sebagai dasar pertimbangan.</p>
5	Amar Putusan	<p>Gugatan Penggugat dikabulkan.</p> <p>Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal demi hukum</p> <p>Pengadilan Pajak mengabulkan gugatan PT SPA dan memutuskan bahwa STP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak batal demi hukum. Pengadilan menilai bahwa STP tersebut tidak memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.</p>	<p>Putusan ini mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dan administratif dalam sistem perpajakan. Keputusan pengadilan menunjukkan bahwa otoritas pajak harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan STP agar tidak merugikan wajib pajak.</p> <p>Putusan ini memberikan keadilan kepada Penggugat dengan membatalkan kewajiban pajak yang dianggap tidak sah.</p>

Kasus sengketa pajak yang melibatkan PT. Sinar Pelita Abadi (PT SPA) dengan Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan permasalahan yang sering terjadi dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya terkait penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Sengketa ini berawal dari keberatan PT SPA terhadap STP yang diterbitkan atas Pajak Penghasilan (PPh) masa pajak Mei 2022. PT SPA berpendapat bahwa jumlah pajak yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi prosedur penerbitan maupun substansi pajak yang dihitung. Ketidaksesuaian ini mendorong PT SPA untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Pajak sebagai upaya untuk memperoleh keadilan dan pembatalan STP yang dianggap tidak sah.

Pengadilan Pajak, dalam putusannya, memutuskan untuk mengabulkan gugatan PT SPA dan membatalkan STP tersebut. Pertimbangan hukum yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada temuan bahwa penerbitan STP tidak memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administratif yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).<sup>10</sup>

Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini tidak hanya merugikan wajib pajak tetapi juga menciptakan potensi keraguan terhadap kredibilitas otoritas pajak di mata masyarakat. Oleh karena itu, kasus ini memberikan pelajaran penting tentang perlunya ketelitian dan transparansi dalam setiap langkah administrasi perpajakan. Selain itu, keputusan ini memiliki implikasi yang signifikan bagi hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Di satu sisi, keputusan pengadilan memberikan keadilan bagi PT SPA, yang merasa dirugikan oleh tindakan administratif yang tidak sesuai. Namun, di sisi lain, kasus ini menunjukkan kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan yang perlu diperbaiki agar kasus serupa tidak terulang.

Penyelesaian sengketa pajak melalui jalur peradilan memang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, tetapi proses ini juga memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit bagi kedua belah pihak.<sup>11</sup> Oleh karena itu, reformasi sistem perpajakan yang mengutamakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Melalui

---

<sup>10</sup> Tørsløv, T., Wier, L., & Zucman, G. (2023). Externalities in International Tax Enforcement: Theory and Evidence. *American Economic Journal: Economic Policy*, 15(2), 497–525. <https://doi.org/10.1257/pol.20200200>

<sup>11</sup> Erwiningsih, W. (2022). IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK INDONESIA. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 248–262. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1585>  
Imanuel Maruli Tua Malau : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000410.99/2024/PP/M.XVIB Tahun 2024: Studi Kasus Sengketa Pajak PT. Sinar Pelita Abadi  
*PERAHU (Penerangan Hukum)*  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

analisis ini, terlihat bahwa peran Pengadilan Pajak sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak wajib pajak.

Sebagai lembaga yang independen, pengadilan tidak hanya menilai kesesuaian penerapan hukum oleh otoritas pajak tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan yang diharapkan dalam sistem hukum. Kasus PT SPA menjadi salah satu contoh konkret di mana pengadilan mampu memberikan keputusan yang berpihak pada prinsip keadilan, sekaligus memberikan panduan tentang bagaimana prosedur perpajakan seharusnya dilaksanakan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan dalam sistem perpajakan Indonesia, baik dari segi kebijakan maupun praktik administratif.

## KESIMPULAN

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa proses penerbitan STP harus dilaksanakan dengan cermat, mengikuti prosedur hukum yang berlaku, untuk mencegah terjadinya kerugian bagi wajib pajak dan potensi sengketa yang memakan waktu serta biaya. Pengadilan Pajak memainkan peran krusial dalam memastikan keadilan bagi pihak yang bersengketa, dengan menilai kesesuaian tindakan otoritas pajak dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi PT SPA tetapi juga berfungsi sebagai preseden penting untuk kasus serupa di masa depan. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa reformasi dalam sistem perpajakan sangat dibutuhkan, terutama dalam hal transparansi, akurasi, dan konsistensi penerapan hukum. Selain itu, perlu adanya upaya peningkatan kualitas administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan. Keseluruhan analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik di Indonesia, baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- DDTC Academy. (2023). *Sengketa Pajak Di Inidonesia: Risiko, Realitas, dan Pencegahan*.
- Erwiningsih, W. (2022). IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK INDONESIA. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 248–262. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1585>
- Fata, H. I., Murti, G. T., Raharja, M. D., Al-Hakim, F. R., & Qatrunada, M. N. (t.t.). *Submission and Settlement of Tax Disputes Through Objection, Appeal, and Judicial Review*.

- Hadi, H. R., Winarno, B., & Budiono, A. R. (2017). *Reformulation of Tax Dispute Resolution in Indonesia*.
- Lenz, H. (2020). Aggressive Tax Avoidance by Managers of Multinational Companies as a Violation of Their Moral Duty to Obey the Law: A Kantian Rationale. *Journal of Business Ethics*, 165(4), 681–697. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4087-8>
- Mekari klikpajak. (2024). *Mengenal Pengadilan Pajak serta Tugas dan Wewenang*.
- OnlinePajak. (2023). *Sengketa Pajak dan Cara Penyelesaiannya di Indonesia*.
- Ribbon, R. H., Romainur (2022). Tax Dispute PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. in the Tax Court Analysis of Decision Number: PUT-117384.15/2014/PP/M.XVI.A Year 2020. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5 (3). <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6736>.
- Sa'adah, N. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 19–33. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.19-33>
- Tørsløv, T., Wier, L., & Zucman, G. (2023). Externalities in International Tax Enforcement: Theory and Evidence. *American Economic Journal: Economic Policy*, 15(2), 497–525. <https://doi.org/10.1257/pol.20200200>